

FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Nur Isna Inayati

nurisna.inayati@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Doddy Setiawan

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

ABSTRACT

This research aims at examining flypaper effect phenomenon on local government expenditure at local government in Indonesia. The study investigate the effect of local own revenue (PAD), general purpose grant (DAU), specific purpose grant (DAK), and revenue sharing (DBH) on local government expenditure. This research use three control variables: populations, geographic (Java and Non-Java) and newly established local government in Indonesia. The sample of the research are 492 local government and 2413 observations from 2009 – 2013. The result of the study shows that local own revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and revenue sharing (DBH) positively affect local government expenditure. However, specific purpose grant have no effect on local government expenditure. The higher local own revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and revenue sharing (DBH) increase local government expenditure. Further, the coefficient of local own revenue (PAD) is smaller than general purpose grant (DAU). The local government spending in Indonesia more depends on the general purpose grant (DAU) rather than local own revenue (PAD). The result of the study provide evidence that flypaper effect is exist in Indonesia.

Key words: flypaper effect, local government expenditure, general purpose grant, revenue sharing

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja daerah. Selain itu penelitian ini menggunakan variabel kontrol: jumlah penduduk, letak geografis (Jawa dan Luar Jawa) dan pemekaran wilayah. Sampel yang digunakan sebanyak 492 kabupaten/kota dengan kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009 hingga 2013 sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 2413 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil akan meningkatkan belanja daerah, sedangkan nilai koefisien dana alokasi umum lebih besar dari nilai koefisien pendapatan asli daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota di Indonesia lebih bergantung kepada Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten/Kota lebih mengandalkan Dana Alokasi Umum dalam hal belanja daerah. Jadi, hasil pengujian mengindikasikan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kata kunci: *flypaper effect*, belanja daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil

PENDAHULUAN

Reformasi telah membawa perubahan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia yang diharapkan

mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud konkrit dari reformasi ialah adanya otonomi daerah dan desentralisasi pada pemerintahan suatu

negara. Otonomi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, karena setiap daerah dituntut untuk membuktikan kemandiriannya. Hal ini berarti otonomi daerah tidak dapat dipandang sebagai wujud kegagalan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah harus diarahkan pada pendanaan yang memadai melalui dana perimbangan antara pusat dan daerah (Marothia, 2010), oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Desentralisasi merupakan alat kebijakan pemerintah yang dianggap efektif dalam menangani masalah yang berkaitan dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara demokrasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi lebih dari pelimpahan wewenang, desentralisasi diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata yaitu peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumberdaya produktif (Mardiasmo, 2009).

Desentralisasi bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Sejak 1 Januari 2001, Indonesia resmi mengimplementasikan desentralisasi fiskal dalam pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utama dalam pelaksanaan desentralisasi adalah menciptakan kemandirian daerah yang ditandai dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang mumpuni (Haryanto, 2014). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang digantikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewajiban serta kewenangan daerah otonom untuk mengelola dan mengurus sendiri keperluan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang tepat sasaran serta mampu mengurangi tingkat kesenjangan sosial antar masyarakat.

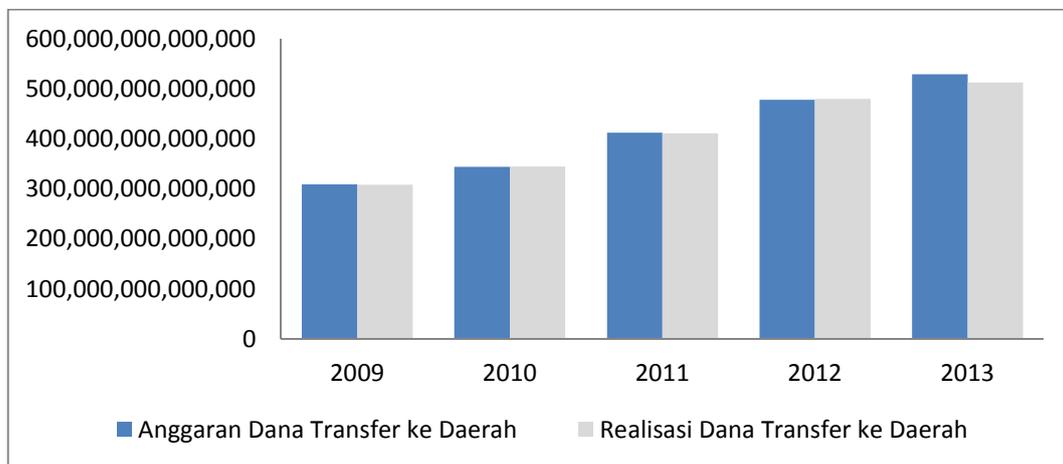
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (yang disingkat menjadi PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain. Dana Perimbangan Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (yang disingkat DBH), Dana Alokasi Umum (yang disingkat DAU) dan Dana Alokasi Khusus (yang disingkat DAK). Penggunaan pendapatan yang diterima oleh daerah sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah, dengan harapan pemerintah daerah dapat menggunakannya secara efektif dan efisien guna untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Sementara itu Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dimana belanja daerah tersebut digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

Optimisme desentralisasi semakin surut setelah berjalan lebih dari sepuluh tahun (Adhamaski, 2015). Semakin panjang umur desentralisasi daerah, semakin menumpuk persoalan klasik yang tak pernah kunjung terselesaikan dan berulang kembali selama bertahun-tahun (Adhamaski, 2015). Oleh karena heterogenitas daerah di Indonesia sangat besar, maka banyak daerah yang justru tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai.

Akibatnya, pemerintah kemudian mengalokasikan dana transfer ke daerah demi mengatasi kesenjangan fiskal baik antar daerah maupun antar pusat dan daerah (Haryanto, 2014). Menurut Amril *et al.* (2015), dalam penelitiannya menyebutkan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah transfer pemerintah pusat. Transfer pemerintah pusat ini merupakan wujud dari kebijakan pelaksanaan otonomi dalam mengatasi *fiscal gap*. Pelaksanaan desentralisasi fiskal justru dinilai me-

nyimpang dari tujuan awalnya. Otonomi yang ditujukan bagi penciptaan kemandirian di daerah justru menimbulkan pola

ketergantungan baru. Akibatnya anggaran transfer ke daerah setiap tahunnya makin membesar (Haryanto, 2014).



Gambar 1
Dana Transfer ke Daerah

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2009, anggaran transfer ke daerah dalam APBN mencapai Rp 309,3 triliun. Anggaran tersebut kemudian meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp 344,6 triliun. Pada tahun 2011, anggaran transfer daerah dalam APBN sudah mencapai Rp 412,5 triliun. Anggaran tersebut kemudian meningkat secara signifikan dalam tahun 2012 menjadi Rp 478,7 triliun. Laporan Realisasi Anggaran APBN 2013, anggaran transfer ke daerah mencapai Rp 529,4 triliun sementara APBN 2014 mencatat target Rp 592,6 triliun atau naik Rp 63,2 triliun.

Perlambatan ekonomi terjadi hingga semester 1 tahun 2015 bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga disebabkan oleh faktor internal seperti rendahnya kualitas belanja daerah itu sendiri. Sistem penganggaran di Indonesia hingga kini masih memfokuskan pada kuantitas penyerapan anggaran semata. Akibatnya, prinsip “anggaran harus dihabiskan” menjadi primadona meskipun dampak yang diberikan justru sering tidak optimal (Fiansyah, 2015). Tujuan utama dari pelaksanaan transfer adalah untuk me-

ngurangi kesenjangan fiskal yang muncul dalam pembangunan antar daerah. Namun, pemberian transfer dihadapkan pada suatu fenomena umum dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah yaitu terjadi peningkatan pengeluaran daerah sejalan dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah, sehingga pemberian transfer tersebut berakibat pada ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah dimana respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer, maka fenomena tersebut disebut dengan *flypaper effects* (Hamilton, 1983; Hines dan Thaler, 1995; Melo, 2002).

Berbagai penelitian empiris dilakukan untuk menemukan fenomena *flypaper effect* belanja daerah yang terjadi di pemerintah daerah. Beberapa penelitian tersebut diantaranya: Cárdenas dan Sharma (2011), membahas mengenai fenomena *flypaper effect* di Mexico dalam kurun waktu 1993-2005. Penelitian ini menggunakan sampel sekitar 48 persen dari jumlah kota di Mexico, dimana hasilnya telah terjadi *flypaper effect* di kota Mexico. Dampak yang terjadi adalah penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kota Mexico. Sour (2013) dalam

penelitiannya ingin membuktikan terjadinya apakah terjadi *flypaper effect* di Kotamadya Mexico. Penelitian ini yang menggunakan data panel dengan kurun waktu 1990-2007 dan hasil dari penelitian ini adalah terbukti terjadi *flypaper effect* di Kotamadya Mexico, dengan meningkatnya belanja yang diperoleh dari pendapatan transfer. Hasil penelitian ini dikonfirmasi oleh Abbott *et al.* (2015) dan Espinosa (2011).

Baskaran (2012), membahas mengenai *flypaper effect* yang terjadi di negara bagian Hesse Jerman. Penelitian ini diteliti dalam kurun waktu 2001-2010 dengan menggunakan variabel independennya adalah pendapatan perkapita, dana transfer dan variabel kontrolnya adalah populasi. Hasil penelitian ini adalah peneliti menemukan bukti yang kuat bahwa benar terjadi *flypaper effect* di negara bagian Hesse Jerman. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan di: Amerika Serikat (Clark dan Whilford, 2011), Argentina (Vegh dan Vuletin, 2015), China (Liu dan Zhao, 2011), Denmark (Kjaergaard, 2015), Italia (Bracco *et al.* 2015), Jepang (Kakamu *et al.*, 2014), Kanada (Mehiriz dan Marceau, 2014), Slovenia (Pevcin, 2014) dan Swedia (Dahlberg *et al.*, 2008). Bukti empiris tentang *flypaper effect* juga ditemukan di penelitian lintas negara yang dilakukan oleh Abbott dan Jones (2012) dan Dell'Anno dan Mourou (2012).

Penelitian yang dipaparkan diatas merupakan penelitian yang dilakukan di luar negeri, sementara di Indonesia telah terjadi perbedaan hasil penelitian (*research gap*) berkaitan dengan *flypaper effect* tersebut. Amril *et al.* (2015) melakukan penelitian *flypaper effect* pada kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dimana kinerja keuangan ini diukur melalui 2 variabel dependen yaitu belanja modal dan belanja operasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik belanja modal maupun belanja operasional telah terjadi *flypaper effect* di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh Olsson dan Valsecchi (2015) juga menunjukkan bahwa

flypaper effect terjadi di Indonesia pada periode sebelum dan sesudah reformasi tahun 1999.

Namun, hasil penelitian Amril *et al.* (2015) tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2012), yang membahas mengenai pengaruh *Unconditional Grants*, Pendapatan Asli Daerah, dan PDRB terhadap Belanja Daerah serta kemungkinan terjadinya *flypaper effect*. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah *Unconditional Grants* dan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan PDRB berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Daerah, oleh karena nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari *Unconditional Grants* dan keduanya signifikan, maka hal ini menunjukkan tidak terjadi *flypaper effect* di Provinsi Jawa Barat. Dahlby (2011) menyatakan bahwa penelitian mengenai *flypaper effect* penting untuk memahami dampak pendanaan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian apakah terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah. Hal tersebut perlu diteliti untuk mengetahui dampak yang terjadi ketika Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil lebih besar dari Pendapatan Asli Daerahnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan dilakukan pada kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Variabel yang digunakan juga tidak hanya berfokus pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum saja, tetapi juga Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil sebagai sumber pendapatan daerah, serta penelitian ini dilakukan dengan rentang waktu 5 tahun yang dimulai pada tahun 2009-2013

TINJAUAN TEORETIS

Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari (a) Pendapatan Asli Daerah,

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (b) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (c) Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah.

Dana perimbangan terdiri dari; (1) Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*); (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah; (3) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Flypaper Effect

Menurut Vegh dan Vuletin (2015), *flypaper effect* secara luas didokumentasikan sebagai peraturan dalam keuangan publik yang memegang kecenderungan pemerintah daerah untuk menghabiskan dana transfer lebih tinggi dari pada menghabiskan pendapatannya sendiri. Hamilton (1983) juga mendefinisikan *flypaper effect* sebagai kecenderungan pemerintah daerah untuk lebih bergantung pada dana transfer daripada menggunakan pendapatan asli daerah. Transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberikan berdasarkan jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut, penerimaan transfer mulai meningkat sehingga ada beberapa pihak tertentu yang memperoleh keuntungan. *Flypaper effect* dianggap sebagai suatu keanehan dalam perilaku yang sulit untuk dirasionalkan, dimana pemerintah daerah menggunakan transfer yang mereka terima dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pengeluaran daerah yang tidak konsisten

dengan teori ekonomi (Hines dan Thaler, 1995).

Peneliti terdahulu menggunakan berbagai pendekatan untuk menjelaskan perilaku pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat ataupun dari pendapatannya sendiri. Beberapa peneliti menemukan bahwa respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri. Artinya, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah terutama pajak daerah. Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *flypaper effect* (Oates, 1999).

Pengembangan Hipotesis

Lalvani (2002) dalam penelitiannya menggambarkan tes empiris mengenai *flypaper effect* untuk perekonomian di India. Penelitian ini juga menguji hipotesis asimetri yang terlihat pada dampak pengurangan dana bantuan. Penelitian dilakukan secara terpisah selama dekade 1980an (1980-1981 sampai 1989-1990) dan 1990an (1991-1992 sampai 1997-1998). Teknik yang digunakan *Pooled cross-section time series* dengan menggunakan prosedur *Generalized Least Squares* (GLS). Hasil yang diperoleh pada penelitian menunjukkan bahwa *flypaper effect* tetap ada. Penelitian ini juga menemukan bahwa selama periode pengurangan dana bantuan, pemerintahan negara bagian mengelola program belanja mereka melalui peningkatan penerimaan pajak mereka sendiri. Ini menyatakan bahwa dana bantuan dari pusat memberikan dampak yang tidak mendorong dan dapat menjadi suatu alasan bahwa pemerintahan negara bagian tidak memanfaatkan pajak potensial mereka secara penuh. Selanjutnya Karnik dan Lalvani (2008) meneliti fenomena *flypaper effect* di negara bagian Maharashtra, India. Hasil penelitiannya menunjukkan bukti *flypaper effect*. Hasil penelitian ini dikonfirmasi oleh Panda dan Nirmala (2013) yang menunjuk-

kan bukti empiris bahwa dana transfer dari pemerintah pusat meningkatkan pembelanjaan pemerintah daerah dan mengurangi pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat untuk meningkatkan roda perekonomian. Hasil penelitian Karnik dan Lalvani (2008), Lalvani (2002) dan Panda dan Nirmala (2013) menunjukkan terjadi *flypaper effect* di India.

Baskaran (2012), membahas mengenai *flypaper effect* yang terjadi di negara bagian Hesse Jerman. Penelitian ini diteliti dalam kurun waktu 2001-2010 dengan menggunakan variabel independennya adalah pendapatan transfer perkapita dan variabel kontrolnya adalah populasi. Hasil penelitian ini adalah peneliti menemukan bukti yang kuat mengenai *flypaper effect* di negara bagian Hesse Jerman.

Sour (2013) meneliti fenomena *flypaper effect* di Mexico. Hasil dari penelitian ini yang menggunakan data panel dengan kurun waktu 1990-2007 adalah terbukti terjadi *flypaper effect* di Mexico, dengan meningkatnya belanja yang diperoleh dari pendapatan transfer. Hasil penelitian ini sejalan dengan Cárdenas dan Sharma (2011), yang membahas mengenai fenomena *flypaper effect* di Mexico dalam kurun waktu 1993-2005. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sekitar 48 persen kota di Mexico, dimana hasilnya telah terjadi *flypaper effect* di Mexico. Dampak yang terjadi adalah penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kota Mexico. Abbott *et al.* (2015) juga menunjukkan bahwa sumber pendapatan utama adalah dana transfer dari pemerintah pusat. Jadi, pemerintah daerah di Mexico sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Espinosa (2011) lebih lanjut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah cenderung lebih banyak membelanjakan dana transfer untuk mendanai belanja lokal dibandingkan daerah dengan tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi. Dampak *flypaper effect* akan berbeda-beda antarpemerintah daerah, tergantung pada tingkat pendapatan asli daerah.

Penelitian mengenai *flypaper effect* juga dilakukan di Asia oleh Kakamu *et al.* (2014) di Jepang dan Liu dan Zhao (2011) di China. Kakamu *et al.* (2014) menggunakan pendekatan Bayesian untuk meneliti *flypaper effect* di Jepang. Hasilnya menunjukkan bahwa *flypaper effect* terjadi di Jepang, terutama di bidang pembiayaan untuk sanitasi, pendidikan, polisi dan penanggulangan bencana. Hasil ini sejalan dengan Liu dan Zhao (2011) yang menunjukkan bahwa transfer dana dari pusat mempunyai dampak negative untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari penerimaan pajak. Jadi, pemerintah daerah di China lebih bergantung kepada transfer dana dari pusat. Bahkan pemerintah di tingkat propinsi di China lebih mengutamakan penggunaan dana transfer untuk mereka sendiri, sehingga melalaikan perkembangan daerah di bawahnya (Wu dan Wang, 2013).

Penelitian mengenai *flypaper effect* juga dilakukan oleh Amusa *et al.* (2008) dengan menggunakan sampel pemerintah daerah di Afrika Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak pendapatan asli daerah di Afrika Selatan melebihi dampak dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan fenomena *flypaper effect* tidak terjadi Afrika Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Thornton (2014).

Melo (2002) menganalisis *flypaper effect* pada belanja daerah sektor publik Kolumbia dengan mempertimbangkan perbedaan struktur kelembagaan. Analisis dilakukan dengan penggunaan alternatif dan model data panel fungsional format. Data yang digunakan berasal dari Pusat data bank pusat Kolumbia periode 1980 sampai 1997. Hasilnya menyatakan bahwa ketika entitas pemerintah daerah sangat bergantung terhadap transfer, koefisien asimetri signifikan secara statistik, dimana pemerintah daerah menutup pengurangan transfer dengan menggunakan sumber pendapatan yang lain. Penelitian di negara Amerika Latin juga dilakukan oleh Acosta (2010). Penelitiannya dilakukan di Argentina. Penelitian Acosta (2010) memperhitungkan dampak saling

ketergantungan antarpemerintah daerah di Argentina saat menganalisis *flypaper effect*. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* juga terjadi pada daerah yang pola pengeluarannya saling bergantung dengan daerah lain. Hasil ini menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi di Argentina.

Gennari dan Messina (2014), menganalisis terjadinya *flypaper effect* di Italia selama kurun waktu 8 tahun. Penelitian ini menggunakan total pengeluaran belanja sebagai variabel dependen, dana transfer dan pendapatan bersih sebagai variabel independent, serta variabel kontrol. Variabel kontrol di penelitian ini terdiri dari populasi (POP), umur daerah dengan kriteria kurang dari 10 tahun dan lebih dari 65 tahun (DEP), pemekaran wilayah (SUR), tingkat pendidikan penduduk (EDU), *degree of altimetry* (ALT), variabel dummy untuk ibu kota provinsi (TYPE), variabel dummy untuk kota yang menjadi “daerah istimewa” (STAT), siklus politik (CYCLE), Lamanya menjabat (TERM), koalisi partai politik (COMP). Penelitian ini menggunakan data panel analysis, dengan sampel 8000 kota madya dari tahun 1999 hingga tahun 2006. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* di Italia. Penelitian ini sejalan dengan Dahlberg *et al.* (2008) yang menunjukkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di Swedia membuktikan adanya peningkatan positif terhadap belanja daerah dan tidak mengurangi tarif pajak. Bracco *et al.* (2015) juga menunjukkan bahwa pemerintah pusat di Italia menggunakan mekanisme dana transfer untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika pihak yang berkuasa di daerah dan pusat berasal dari partai yang sama, maka dana transfer dari pemerintah pusat akan meningkat. Selanjutnya pemerintah daerah akan menggunakan dana ini untuk menambah pembiayaan. Jadi, *flypaper effect* di Italia juga dipengaruhi oleh faktor politik. Penelitian mengenai *flypaper effect* juga banyak dilakukan di Spanyol,

misalnya oleh Bastida *et al.* (2012), Delgado dan Mayor (2011) dan Guillamón *et al.* (2011). Perkembangan ekonomi di Spanyol sangat beragam antardaerah, jadi ada perbedaan yang besar antar daerah di Spanyol dalam hal kondisi ekonomi, dan kondisi politik yang beragam (González-Alegre, 2015), sehingga menarik untuk melihat fenomena *flypaper effect* di Spanyol. Delgado dan Mayor (2011) meneliti dampak dana transfer terhadap penetapan tingkat pajak daerah di Spanyol. Hasil penelitian mereka tidak menemukan fenomena *flypaper effect* pada dampak transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hasil ini tidak mendukung fenomena *flypaper effect* di Spanyol. Akan tetapi Bastida *et al.* (2012) menunjukkan hasil yang berlawanan dengan Delgado dan Mayor (2011). Bastida *et al.* (2012) mengemukakan bahwa dana transfer mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan fenomena *flypaper effect*. Namun, Kepala Daerah yang menjabat di Spanyol tidak memanfaatkan *flypaper effect* pada saat mereka menjabat (Guillamón *et al.*, 2011). Kjaergaard (2015) juga menunjukkan bahwa faktor politik tidak berpengaruh dalam hal *flypaper effect* di Denmark. Dalam konteks *flypaper effect*, Pevcin (2014) tidak menemukan bukti yang konklusif mengenai keberadaan *flypaper effect* di Slovenia.

Mehiriz dan Marceau (2014) meneliti dampak transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Propinsi Quebec di Kanada. Sampel penelitiannya adalah 1084 pemerintah daerah di Quebec pada periode 2001 – 2007. Hasil penelitiannya mendukung *flypaper effect* di Quebec. Pemerintah daerah bereaksi berbeda terhadap tipe dana yang ditransfer, sehingga sebaiknya analisis efektifitas bantuan pemerintah pusat memperhatikan jenis dana yang ditransfer. Di lain pihak, penelitian Cyrenne dan Pandey (2015) menunjukkan bahwa transfer dana dari pusat mengakibatkan pemerintah cenderung tidak membelanjakan dana tersebut untuk pembiayaan yang produktif.

Clark dan Whitford (2011) meneliti dampak bantuan dana dari *US Environmental Protection Agency (EPA)* terhadap belanja negara bagian di Amerika. Hasilnya menunjukkan bahwa terhadap hubungan positif antara belanja pemerintah pusat dan negara bagian di Amerika Serikat. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat fenomena *flypaper effect* di Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan penelitian Nesbit dan Kreft (2009) yang menunjukkan adanya fenomena *flypaper effect* pada pembiayaan proyek jalan raya. Akan tetapi Thornton (2014) justru menunjukkan dalam kasus belanja pendanaan untuk kegiatan non-profit tidak terdapat bukti yang memadai untuk mendukung *flypaper effect*. Bahkan penelitian Sobel dan Crowley (2014) menunjukkan bahwa hibah dari pemerintah pusat meningkatkan pendapatan dari pajak untuk tahun yang akan datang. Jadi dampak hibah baru terjadi pada masa akan datang.

Penelitian Melo (2002) menunjukkan bahwa (1) dengan mempertimbangkan perbedaan struktur kelembagaan ditemukan *flypaper effect* pada transfer antar pemerintah dimana pendapatan daerah sangat tergantung pada transfer antar pemerintah. Khususnya, ketika transfer lebih dari 50%, transfer antar pemerintah cenderung merangsang belanja publik lokal dibanding peningkatan dalam pendapatan regional, (2) *flypaper effect* sangat sensitif terhadap spesifikasi dari belanja daerah, (3) analisis asimetri dalam reaksi terhadap transfer antar pemerintah menunjukkan bahwa pengurangan transfer per kapita secara nyata menyebabkan pengurangan dalam belanja publik daerah.

Masdjojo dan Sukartono (2009), menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah, serta menganalisis *flypaper effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dana Perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu 2006 hingga 2008, dengan obyek

penelitian sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah menyampaikan Laporan Keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil perbandingan uji statistic t, sig, Korelasi dan Koefisien Determinasi dari variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah adalah lebih besar daripada nilai-nilai statistik Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Jawa Tengah. Penelitian ini sejalan dengan hasil Olsson dan Valsecchi (2015) yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil yang berasal dari pembagian hak sumber daya alam di Indonesia mengakibatkan peningkatan terhadap belanja, tetapi tidak menurunkan tarif pajak yang berlaku di daerah tersebut. Lewis (2013) mengemukakan bahwa DAK berperan besar dalam meningkatkan belanja daerah di Indonesia dibandingkan dengan DAU.

Amril *et al.* (2015) melakukan penelitian *flypaper effect* pada kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dimana kinerja keuangan ini diukur melalui 2 variabel dependent yaitu belanja modal dan belanja operasional, sedangkan untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana bagi hasil, dana alokasi, tarif pajak lokal, pendapatan perkapita serta variabel dummy untuk membedakan otonomi dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik belanja modal maupun belanja operasional telah terjadi *flypaper effect* di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan penelitian Purbarini dan Masdjojo (2015) menemukan bahwa terjadi perbedaan hasil pada belanja modal dan belanja operasi. Fenomena *flypaper effect* terjadi pada belanja operasi, tetapi tidak ada bukti empiris pada belanja modal.

Iskandar (2012), membahas mengenai pengaruh *unconditional grants*, pendapatan asli daerah, dan PDRB terhadap belanja

daerah serta kemungkinan terjadinya *flypaper effect*. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah *unconditional grants* dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan PDRB berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Oleh karena nilai koefisien pendapatan daerah lebih besar dari *unconditional grants* dan keduanya signifikan, maka hal ini menunjukkan tidak terjadi *flypaper effect* di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Kang dan Setyawan (2012). Mereka menunjukkan belanja daerah di Indonesia lebih dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah daripada dana yang ditransfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kang dan Setyawan (2012) tidak menemukan bukti *flypaper effect* di Indonesia.

Burhanuddin (2012), meneliti tentang pengaruh belanja pegawai, investasi pemerintah, dan pembayaran utang pemerintah daerah terhadap fenomena *flypaper effect*. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 30 daerah di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2009 hingga 2011. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Alat yang digunakan penelitian adalah regresi logistik. Hasil dari penelitian ini belanja pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *flypaper effect*. Sedangkan Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap *flypaper effect*.

Menurut Melo (2002), asumsi penentuan terjadinya fenomena *flypaper effect* adalah apabila nilai koefisien dana alokasi umum terhadap belanja daerah lebih besar daripada nilai koefisien pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dan atau apabila hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : Terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah di Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) Populasi Penduduk, jumlah penduduk merupakan indikator kependudukan yang menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan berimplikasi terhadap perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan yang berdampak terhadap besarnya pengeluaran pemerintah (belanja langsung) untuk membiayai pembangunan guna dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. (2) Daerah Jawa dan Luar Jawa, pada saat ini era desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk aktif mengelola dan membangun daerahnya masing-masing, dengan tujuan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih merata diseluruh wilayah Indonesia baik di wilayah Jawa maupun Luar Jawa. Istiandari (2009), menyatakan bahwa kualitas tata kelola ekonomi daerah di Jawa secara umum terbukti lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal tersebut digambarkan oleh rerata nilai indeks gabungan tata kelola ekonomi daerah kedua wilayah yaitu 64,25 poin untuk rerata nilai indeks di Jawa dan 59,84 poin untuk nilai indeks diluar Jawa. (3) Pemekaran Wilayah, dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Bab II pasal 2, dinyatakan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (iv) percepatan pengelolaan potensi daerah; (v) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Semakin banyaknya daerah pemekaran baru maka setiap tahun jumlah transfer dana

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin tinggi. Hal ini menyebabkan jumlah Belanja Negara setiap tahun semakin meningkat. Beban biaya akibat pemekaran daerah yang harus ditanggung oleh APBN akan semakin besar porsinya dari tahun ke tahun apabila laju pemekaran daerah tidak dapat dihentikan. Pemekaran daerah yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi daerah akan semakin menambah beban pemerintah pusat untuk mencukupi biaya transfer daerah dari daerah otonomi baru (Terrini, 2013).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder yang telah disediakan dan dipublikasi oleh pihak lain. Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut dimensi waktunya, penelitian ini merupakan penelitian *poled* yang merupakan gabungan dari *times series* yaitu penelitian yang menggunakan dimensi satu waktu dengan menggunakan beberapa objek penelitian (*cross section*).

Data dan Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipublikasi melalui *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu *www.bpk.go.id*. Data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Selain data yang diperoleh melalui *website* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, penelitian ini juga memperoleh data yang dipublikasi melalui *website* Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu *http://regionalinvest.ment.bkpm.go.id*. Data yang diperoleh dari *website* Badan Koordinasi Penanaman Modal diantaranya populasi penduduk Kabupaten/

Kota, Jawa/Non Jawa, dan pemekaran wilayah Kabupaten/Kota.

Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Terikat

Variabel terikat pada penelitian ini ialah belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah diartikan sebagai segala bentuk pembebanan daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan netto dalam suatu periode tahun anggaran. Belanja daerah ditunjukkan dalam angka nominal mata uang Rupiah (Rp) sehingga skala datanya adalah rasio. Menurut Masdjojo dan Sukartono (2009), belanja daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BD = BL + BTL$$

Keterangan:

BD : Belanja Daerah

BL : Belanja Langsung

BTL : Belanja Tidak Langsung

Variabel Bebas

a. Pendapatan Asli Daerah

Variabel bebas pertama pada penelitian ini ialah Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah diartikan pendapatan yang dipungut daerah sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan dalam angka nominal mata uang Rupiah (Rp) sehingga skala datanya adalah rasio. Menurut Masdjojo dan Sukartono (2009), Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PAD = PD + RD + HPKD + PADL$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

HPKD : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

PADL : Pendapatan Asli Daerah Lain-lain

b. Dana Alokasi Umum

Variabel bebas kedua pada penelitian ini ialah Dana Alokasi Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum diartikan sebagai dana yang berasal dari alokasi pendapatan APBN ke daerah guna untuk pemerataan keuangan daerah. Dana Alokasi Umum ditunjukkan dalam angka nominal mata uang Rupiah (Rp) sehingga skala datanya adalah rasio. Menurut Masdjojo dan Sukartono (2009), Dana Alokasi Umum dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU : Dana Alokasi Umum

AD : Alokasi dasar

CF : Celah Fiskal

c. Dana Alokasi Khusus

Variabel bebas ketiga pada penelitian ini ialah Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus diartikan dana yang berasal dari alokasi pendapatan APBN ke daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sebagai prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ditunjukkan dalam angka nominal mata uang Rupiah (Rp) sehingga skala datanya adalah rasio. Menurut Masdjojo dan Sukartono (2009), Dana Alokasi Khusus dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DAK = PAD + DAU - BPD$$

Keterangan:

DAK : Dana Alokasi Khusus

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

BPD : Belanja Pegawai Daerah

d. Dana Bagi Hasil

Variabel bebas keempat pada penelitian ini ialah Dana Bagi Hasil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil diartikan sebagai dana yang berasal dari alokasi pendapatan APBN ke daerah untuk mendanai ke-

butuhan daerah. Dana Bagi Hasil ditunjukkan dalam angka nominal mata uang Rupiah (Rp) sehingga skala datanya adalah rasio. Menurut Masdjojo dan Sukartono (2009), Dana Bagi Hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 $DBH = DBHP + DBHBP$

Keterangan:

- DBH : Dana Bagi Hasil
- DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak
- DBHBP : Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang mengontrol hubungan variabel dependen dan variabel independen dan pasti berpengaruh terhadap variabel dependen. Gennari dan Messina (2014) dalam penelitiannya menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari populasi (POP), umur daerah dengan kriteria kurang dari 10 tahun dan lebih dari 65 tahun (DEP), pemekaran wilayah (SUR), tingkat pendidikan penduduk (EDU), *degree of altimetry* (ALT), variabel dummy untuk ibu kota provinsi (TYPE), variabel dummy untuk kota yang menjadi “daerah istimewa” (STAT), siklus partai politik (CYCLE), Lamanya menjabat (TERM), koalisi partai politik (COMP).

Penelitian ini mengadopsi variabel kontrol dari penelitian Gennari dan Messina (2014) yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia diantaranya: (a) Jumlah Penduduk. Penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Jumlah penduduk ditunjukkan dalam jutaan sehingga skala datanya adalah rasio; (b) Jawa dan Non Jawa. Variabel kontrol Jawa dan luar Jawa merupakan variabel dummy, dimana pengukuran variabelnya diukur dengan cara memberikan angka 1 untuk daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa, dan angka 0 untuk daerah Kabupaten/Kota di wilayah luar Jawa; (c) Pemekaran wilayah. Variabel kontrol pemekaran wilayah merupakan

variabel dummy, dimana pengukuran variabelnya diukur dengan cara memberikan angka 1 untuk daerah Kabupaten/Kota yang merupakan hasil dari daerah pemekaran, dan angka 0 untuk daerah Kabupaten/Kota yang merupakan bukan hasil dari daerah pemekaran.

Metode Analisis Data

Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, dimana jumlah observasi dapat digunakan untuk kepentingan estimasi paramater populasi akan semakin besar. Semakin banyaknya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian, tingkat keakuratan hasil penelitian akan semakin meningkat, maka model dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it} \beta_j + \epsilon_{it}$$

Dimana:

- i = 1,2,...,N
- t = 1,2,...,T
- N = jumlah unit *cross section*
- T = jumlah periode *time series*
- N x T = jumlah data panel

Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{1it} + \beta_2 DAV_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \beta_5 PPLS_{it}, JWJ_{it}, PW_{it} + e_{it}$$

Dimana:

- BD : Belanja daerah
- i : Indeks spesifik kabupaten/kota.
- t : Indeks untuk tahun.
- β_0 : Konstanta
- $\beta_{1,2,3,4}$: Koefisien regresi berganda masing-masing $x_{1,2,3,4}$
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- DBH : Dana Bagi Hasil
- PPLS, JWJ, PW : Populasi, Jawa/non Jawa, Pemekaran Wilayah
- e : *Random Error*

Hasil Dan Diskusi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik *pooled data*.

Untuk membantu pengujian data, penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak komputer berupa STATA versi 12.

Hubungan korelasi antar variabel dapat dilihat pada Tabel 1 berdasarkan hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki hubungan positif dengan keempat variabel independen (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan daerah baik pendapatan asli daerahnya maupun dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, maka akan meningkatkan belanja daerahnya. Hasil korelasi ini juga menunjukkan bahwa

keempat variabel independen dan variabel kontrol memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Variabel kontrol populasi penduduk dan Jawa/Non Jawa menunjukkan hasil yang positif terhadap belanja daerah, sedangkan pemekaran wilayah memiliki hasil yang negatif terhadap belanja daerah.

Penelitian ini memilih salah satu diantara tiga model data panel. Tiga model data panel tersebut diantaranya *Pooled Least Square*, *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Pemilihan model data panel dapat dilakukan dengan cara melakukan Uji *Chow*, Uji *Lagrange Multiplier* (LM), dan Uji *Hausman*. Ketiga pengujian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Korelasi

	BD	PAD	DAU	DAK	DBH	PPLS	JNJ	PW
BD	1,0000							

PAD	0,5241 (0,0000) ^a	1,0000						

DAU	0,4939 (0,0000) ^a	0,4419 (0,0000) ^a	1,0000					

DAK	0,1794 (0,0000) ^a	0,0312 (0,1253)	0,5576 (0,0000) ^a	1,0000				

DBH	0,4363 (0,0000) ^a	0,1648 (0,0000) ^a	-0,0999 (0,0000) ^a	-0,1745 (0,0000) ^a	1,0000			

PPLS	0,5220 (0,0000) ^a	0,5676 (0,0000) ^a	0,7569 (0,0000) ^a	0,3509 (0,0000) ^a	0,0906 (0,0000) ^a	1,0000		

JNJ	0,2853 (0,0000) ^a	0,2721 (0,0000) ^a	0,5364 (0,0000) ^a	0,2046 (0,0000) ^a	-0,0528 (0,0095) ^a	0,6131 (0,0000) ^a	1,0000	

PW	-0,2311 (0,0000) ^a	-0,1928 (0,0000) ^a	-0,4185 (0,0000) ^a	-0,1991 (0,0000) ^a	-0,0423 (0,0374) ^b	-0,3444 (0,0000) ^a	-0,3545 (0,0000) ^a	1,0000

BD = Belanja Daerah, PAD = Pendapatan Asli Daerah, DAU = Dana Alokasi Umum, DAK = Dana Alokasi Khusus, DBH = Dana Bagi Hasil, PPLS = Populasi Penduduk, JNJ = Jawa/Non Jawa, PW = Pemekaran Wilayah.

a) Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk memilih uji *Pooled Least Square* (PLS) dengan uji *Fixed effect Model* (FEM). Hasil uji *Chow* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. Nilai yang perlu diperhatikan dalam

pengujian uji *Chow* adalah nilai probabilitas dari *F-statistic*.

Hipotesis yang digunakan dalam uji *Chow* sebagai berikut:

H_0 : *Pooled Least Square*.

H_a : *Fixed Effect Model*.

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Variabel Independen		Prob.
PAD	Prob > F	0,0000
DAU	Prob > F	0,0000
DAK	Prob > F	0,0000
DBH	Prob > F	0,0000

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah, DAU = Dana Alokasi Umum, DAK = Dana Alokasi Khusus, DBH = Dana Bagi Hasil

Berdasarkan nilai probabilitas F-statistik apabila nilainya lebih besar dari tingkat signifikan (5%), maka H_0 diterima. Jika nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa nilai probabilitas F-statistik uji Chow sebesar 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji Chow pada penelitian ini adalah tolak H_0 , terima H_a , sehingga model pada penelitian ini mengikuti *Fixed Effect Model* (FEM).

b) Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk membandingkan *Pooled Least Square* (PLS) dan *Random Effect Model* (REM). Hasil uji *Lagrange Multiplier* (LM) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.

Nilai yang perlu diperhatikan dalam pengujian uji *Lagrange Multiplier* adalah nilai probabilitas dari Chibar2. Hipotesis yang digunakan dalam uji *Lagrange Multiplier* sebagai berikut:

H_0 : *Pooled Least Square*.

H_a : *Random Effect Model*.

Tabel 3
Hasil Uji Lagrange Multiplier

Variabel Independen		Prob.
PAD	Prob > Chibar2	0,0000
DAU	Prob > Chibar2	0,0000
DAK	Prob > Chibar2	0,0000
DBH	Prob > Chibar2	0,0000

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah, DAU = Dana Alokasi Umum, DAK = Dana Alokasi Khusus, DBH = Dana Bagi Hasil

Berdasarkan nilai probabilitas Chibar2 apabila nilainya lebih besar dari tingkat signifikan (5%), maka H_0 diterima. Jika nilai probabilitas Chibar2 lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa nilai probabilitas Chibar2 uji *Lagrange Multiplier* sebesar 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji *Lagrange Multiplier* pada penelitian ini adalah tolak H_0 , terima H_a , sehingga model pada pe-

nelitian ini mengikuti *Random Effect Model* (REM).

c) Uji *Hausman*

Uji *Hasuman* yang digunakan untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hasil uji *Hasuman* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.

Nilai yang perlu diperhatikan dalam pengujian uji *Hasuman* adalah nilai probabilitas dari Chi2. Hipotesis yang digunakan dalam uji *Hasuman* sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*.

H_a : *Fixed Effect Model*.

Berdasarkan nilai probabilitas Chi2 apabila nilainya lebih besar dari tingkat signifikan (5%), maka H_0 diterima.

Tabel 4
Hasil Uji *Hausman*

Variabel Independen		Prob.
PAD	Prob > Chi2	0,8014
DAU	Prob > Chi2	0,7493
DAK	Prob > Chi2	0,7864
DBH	Prob > Chi2	0,8444

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah, DAU = Dana Alokasi Umum, DAK = Dana Alokasi Khusus, DBH = Dana Bagi Hasil

Jika nilai probabilitas Chi2 lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa keempat variabel independen nilai probabilitas Chi2 uji *Hasuman* lebih besar dari 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji *Hasuman* pada penelitian ini adalah terima H_0 , sehingga model pada penelitian ini mengikuti *Random Effect Model* (REM).

Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan tiga pengujian diantaranya Uji *Chow*, Uji *Lagrange Multiplier*, dan Uji *Hausman*, guna untuk menentukan model data panel yang paling tepat untuk penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Metode yang digunakan pada *Random Effect Model* adalah *GLS Regression*, jadi tidak perlu melakukan pengujian Heteroskedastisitas dan Autokorelasi.

Pada Tabel 5 diperoleh persamaan regresi data panel yaitu sebagai berikut:

$$BD_{it} = \alpha_i + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \varepsilon_i + u_{it}$$

$$BD_{it} = -10965,98 + 1,176943 PAD_{it} + 1,212072 DAU_{it} + 0,6117774 DAK_{it} + 1,033944 DBH_{it} + 0,441499 PPLS_{it} + 20190,72 JNJ_{it} + 28053,98 PW_{it}$$

Menurut Melo (2002), asumsi penentuan terjadinya fenomena *flypeper effect* adalah apabila nilai koefisien dana alokasi umum terhadap belanja daerah lebih besar dari pada nilai koefisien pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dan atau apabila hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak signifikan.

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan, nilai koefisien dari pendapatan asli daerah sebesar 1,176943 sedangkan nilai koefisien dari dana alokasi umum sebesar 1,212072. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu kriteria penentuan terjadinya fenomena *flypeper effect* yang disebutkan oleh Melo (2002) dalam penelitian-

Tabel 5
Hasil Uji Regresi
Analisis Regresi

	<i>Predicted Sign</i>	Belanja Daerah				
		1	2	3	4	5
cons_ (a)	(+/-)	546534,3 (0,000) ^a	14058,7 (0,001) ^a	482901 (0,000) ^a	437302,7 (0,000) ^a	-10965,98 (0,738)
PAD	+	1,589006 (0,000) ^a				1,176943 (0,000) ^a
DAU	+		1,215431 (0,000) ^a			1,212072 (0,000) ^a
DAK	+			1,446325 (0,011) ^b		0,6117774 (0,219)
DBH	+				0,9292901 (0,000) ^a	1,033944 (0,000) ^a
PPLS	+	0,3983651 (0,000) ^a	0,3705795 (0,000) ^a	0,6680865 (0,000) ^a	0,5927078 (0,000) ^a	0,441499 (0,173)
JNJ	(+/-)	-48954,13 (0,341)	-184956 (0,001) ^a	-129272 (0,020) ^b	-1743 (0,965)	20190,72 (0,537)
PW	(+/-)	93376,75 (0,008) ^a	-9992,615 (0,800)	-94344,33 (0,013) ^b	-76157,83 (0,005) ^a	28053,98 (0,217)
R-sq		0,3522	0,2925	0,2751	0,4274	0,5371
F-Stat		804,88	660,08	497,68	1487,23	2789,99
F-Prob		(0,0000) ^a	(0,0000) ^a	(0,0000) ^a	(0,0000) ^a	(0,0000) ^a
N		2413	2413	2413	2413	2413

Keterangan:

a = signifikansi di tingkat 1%, b = signifikansi di tingkat 5%, c = signifikansi di tingkat 10%.
BD = Belanja Daerah, PAD = Pendapatan Asli Daerah, DAU = Dana Alokasi Umum, DAK = Dana Alokasi Khusus, DBH = Dana Bagi Hasil, PPLS = Populasi Penduduk, JNJ = Jawa/Non Jawa, PW = Pemekaran Wilayah.

nya terpenuhi yaitu nilai koefisien dana alokasi umum terhadap belanja daerah lebih besar dari pada nilai koefisien pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten /Kota di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Baskaran (2012), Bastida *et al.* (2012), Bracco *et al.* (2015), Cárdenas dan Sharma (2011), Clark dan Whitford (2011), Dahlberg *et al.* (2008), Gennari dan Messina (2014),

Kakamu *et al.* (2014), Lalvani (2002), Mehiriz dan Marceau (2014), Melo (2002), Sour (2013) yang menemukan fenomena *flypaper effect*. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan Amusa *et al.* (2008), Delgado dan Mayor (2011), dan Thornton (2014) yang tidak menemukan *flypaper effect*. Dalam konteks penelitian sejenis di Indonesia, hasil ini memperkuat hasil penelitian Amril *et al.* (2015), Burhanuddin (2012), Masdjojo dan Sukartono (2009), Olsson dan Valesecchi (2015) bahwa ada fenomena *flypaper effect*. *Flypaper effect* akan meningkatkan belanja

pemerintah daerah lebih besar dari pada penerimaan daerah itu sendiri serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pemerintah pusat dibanding mengelola sumber daya daerah itu sendiri. Lalvani (2002), dalam penelitiannya menemukan bahwa selama periode dana bantuan dari pemerintah pusat dikurangi, pemerintahan daerah berusaha mengelola belanja mereka melalui peningkatan penerimaan pajak daerah sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa dana bantuan dari pemerintah pusat memberikan dampak yang negatif karena tidak mendorong kemandirian suatu daerah dan dapat menjadi suatu alasan bahwa pemerintahan daerah tidak memanfaatkan pajak daerah secara potensial.

Dampak dari adanya *flypaper effect* ini adalah kecenderungan pemerintah daerah untuk tidak berperilaku seperti biasanya, yaitu melakukan penganggaran pengeluaran pemerintah daerah setinggi mungkin dengan tidak berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar nantinya dapat memperoleh bantuan berupa dana transfer dari pemerintah pusat. Haryanto (2014), kenaikan anggaran transfer ke daerah tidak menjadi persoalan jika didukung dengan kualitas belanja daerah yang unggul.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2416 data dari tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, serta menggunakan variabel kontrol populasi penduduk, Jawa/non Jawa dan pemekaran wilayah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh positif

terhadap belanja daerah. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan masing-masing variabel, koefisien dana alokasi umum lebih besar dari pada koefisien pendapatan asli daerah sebesar 1,212072. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Fenomena *flypaper effect* terjadi karena respon belanja daerah lebih besar bersumber dari dana alokasi umum dari pada pendapatan asli daerah sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah Kabupaten/Kota di Indonesia belum mampu menciptakan aspek kemandiriannya yang ditandai dengan tidak mumpuninya daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya.

Implikasi dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah diantaranya, tetap terjadi *fiscal gap* antar daerah, menyebabkan unsur ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan mengakibatkan kemandirian daerah berkurang karena daerah tidak mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penghasil pendapatan asli daerah seperti peningkatan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, A., R. Cabral, P. Jones, dan R. Palacios. 2015. Political Pressure and Procyclical Expenditure: An Analysis of the Expenditures of State Governments in Mexico. *European Journal of Political Economy* 37: 195-206.
- Abbott, A. dan P. Jones. 2012. Intergovernmental Transfers and Procyclical Public Spending. *Economics Letters* 115(3): 447-451.
- Acosta, P. 2010. The “Flypaper Effect” in Presence of Spatial Interdependence: Evidence from Argentinean Municipalities. *The Annals of Regional Science* 44(3): 453-466.

- Adhamaski. 2015. Menggenjot Ekonomi Daerah. <http://www.coreindonesia.org/view/147/menggenjot-kinerja-ekonomi-daerah.html>. Diakses tanggal 12 Desember 2015.
- Amril, A., E. Erfit, dan M. Safari. 2015. Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah* 2(3): 135-146.
- Amusa, H., R. Mabunda, dan R. Mabugu. 2008. Fiscal Illusion at the Local Sphere: An Empirical Test of the Flypaper Effect Using South African Data. *South African Journal of Economics* 76(3): 443-465.
- Baskaran, T. 2012. The Flypaper Effect: Evidence from a Natural Experiment in Hesse. *MPPA Paper No. 37144*.
- Bastida, F., M. D. Guillamón, dan B. Benito. 2012. Municipal Spending in Spain: Spatial Approach. *Journal of Urban Planning and Development* 139(2): 79-93.
- Bracco, E., B. Lockwood, F. Porcelli, dan M. Redoano. 2015. Intergovernmental Grants as Signals and the Alignment Effect: Theory and Evidence. *Journal of Public Economics* 123: 78-91.
- Burhanuddin, A. 2012. Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Daerah terhadap Fenomena Flypaper Effect. *Accounting Analysis Journal* 1(1): 1-11.
- Cárdenas, O. J. dan A. Sharma. 2011. Mexican Municipalities and the Flypaper Effect. *Public Budgeting & Finance* 31(3): 73-93.
- Clark, B. Y. dan A. B. Whitford. 2011. Does More Federal Environmental Funding Increase or Decrease States' Efforts?. *Journal of Policy Analysis and Management* 30(1): 136-152.
- Cyrenne, P. dan M. Pandey. 2015. Fiscal Equalization, Government Expenditures and Endogenous Growth. *International Tax and Public Finance* 22(2): 311-329.
- Dahlberg, M., E. Mörk, J. Rattsø, dan H. Ågren. 2008. Using a Discontinuous Grant Rule to Identify the Effect of Grants on Local Taxes and Spending. *Journal of Public Economics* 92(12): 2320-2335.
- Dahlby, B. 2011. The Marginal Cost of Public Funds and the Flypaper Effect. *International Tax and Public Finance* 18(3): 304-321.
- Delgado, F. J. dan M. Mayor. 2011. Tax Mimicking Among Local Governments: Some Evidence from Spanish Municipalities. *Portuguese Economic Journal* 10(2): 149-164.
- Dell'Anno, R. dan P. Mourao. 2012. Fiscal Illusion Around the World: An Analysis Using the Structural Equation Approach. *Public Finance Review* 40(2): 270-299.
- Espinosa, S. 2011. Mexican Flypaper: Money Sticks Where it Hits . . . But Every Time?. *Latin American Policy* 2(2): 122-136.
- Fiansyah, R. 2015. Belanja Daerah Ganjal Ekonomi. <http://ekbis.sindonews.com/read/1036337/150/belanja-daerah-ganjali-ekonomi-1440387385>. Diakses tanggal 12 Desember 2015.
- Gennari, E dan G. Messina. 2014. How Sticky Are Local Expenditure in Italy? Assessing the Relevance of the Flypaper Effect Through Municipal Data. *Int Tax Public Finance* 21 (2): 324-344.
- González-Alegre, J. 2015. Does Fiscal Decentralization Affect the Effectiveness of Intergovernmental Grants? European Regional Policy and Spanish Autonomous Regions. *Papers in Regional Science* 94(4): 817-847.
- Guillamón, M. D., F. Bastida, dan B. Benito. 2011. The Determinants of Local Government's Financial Transparency. *Local Government Studies* 37(4): 391-406.
- Hamilton, B. W. 1983. The Flypaper Effect and Other Anomalies. *Journal of Public Economics* 22 (3): 347-361.
- Haryanto, J. T. 2014. Peningkatan Kualitas Belanja di Daerah Sudah Mendesak. <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41467>. Diakses tanggal 12 Desember 2015.
- Hines, J. R. dan R. H. Thaler. 1995. Anomalies-The Flypaper Effect. *Journal of Economic Perspectives* 9(4): 217-226.

- Iskandar, I. 2012. Flypaper Effect pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13 (1): 113-131.
- Istiandari, R. 2009. *Tata kelola Ekonomi Daerah & Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Kang, Y. dan D. Setyawan. 2012. Intergovernmental Transfer and the Flypaper Effect: Evidence from Municipalities/Regencies in Indonesia. *KDI School of Public Policy and Management Working Paper Series Index*.
- Kakamu, K., H. Yunoue, dan T. Kuramoto. 2014. Spatial Patterns of Flypaper Effects for Local Expenditure by Policy Objective in Japan: A Bayesian Approach. *Economic Modelling* 37: 500-506.
- Karnik, A. dan M. Lalvani. 2008. Flypaper Effect Incorporating Spatial Interdependence. *Review of Urban & Regional Development Studies* 20(2): 86-102.
- Kjaergaard, M. 2015. The Flypaper Effect: Do Political Institutions Affect Danish Local Governments' Response to Intergovernmental Grants?. *Local Government Studies* 41(4): 534-552.
- Lalvani, M. 2002. The Flypaper Effect: Evidence from India. *Public Budgeting & Finance* 22(3): 67-88.
- Lewis, B. 2013. Local Government Capital Spending in Indonesia: Impact of Intergovernmental Fiscal Transfers. *Public Budgeting & Finance* 33(1): 76-94.
- Liu, Y. dan J. Zhao. 2011. Intergovernmental Fiscal Transfers and Local Tax Efforts: Evidence from Provinces in China. *Journal of Economic Policy Reform* 14(4): 295-300.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marothia, D. 2010. Decentralisation of Natural Resource Management in India: An Institutional Perspective. *Indian Journal of Agricultural Economics* 65(1): 1-34.
- Masdjojo, G dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Telaah Manajemen* 6(1): 32-50.
- Mehiriz, K. dan R. Marceau. 2014. The Flypaper and Asymmetric Effects of Intergovernmental Grants to Quebec Municipalities. *Public Budgeting & Finance* 34(1): 85-102.
- Melo, L. 2002. The Flypaper Effect under Different Institutional Contexts: The Colombian Case. *Public Choice* 111(3-4): 317-345.
- Nesbit, T. M. dan S. F. Kreft. 2009. Federal Grants, Earmarked Revenues, and Budget Crowd-Out: State Highway Funding. *Public Budgeting & Finance* 29(2): 94-110.
- Oates, W. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature* 37(3): 1120-1149.
- Olsson, O. dan M. Valsecchi. 2015. Evidence From a Policy Reform in Indonesia. *Working paper in Economics No.635*. University of Gothenburg.
- Panda, P. K. dan V. Nirmala. 2013. Central Fiscal Transfers and States' Spending In India: An Analysis of Incentive Effect. *Economics Bulletin* 33(2): 1229-1246.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pevcin, P. (2014). Expenditure Effects of Intergovernmental Transfers—the Case of Slovenia. *International Public Administration Review* 9(4): 31-46.
- Purbarini, E. dan G. N. Masdjojo. 2015. Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital Expenditure of the City Government in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 16(1): 75-84.
- Sobel, R. S. dan G. R. Crowley. 2014. Do Intergovernmental Grants Create Ratchets in State and Local taxes? *Public Choice* 158(1): 167-187.

- Sour, L. 2013. The Flypaper Effect in Mexican Local Governments. *Estudios Economicos* 28(1): 165-196.
- Tenrini, R. H. 2013. Menyibak Kegagalan Pemekaran. www.kemenkeu.go.id/.../2013_kajian_pkapbn_Menyibak_Kegagalan_Pemekaran_RTH.pdf. Diakses tanggal 5 Maret 2016.
- Thornton, J. P. (2014). Flypaper Nonprofits: The Impact of Federal Grant Structure on Nonprofit Expenditure Decision. *Public Finance Review* 42(2): 176-198.
- Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- _____ No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____ Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____ Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Vegh, A. C. dan G. Vuletin. 2015. Unsticking the Flypaper Effect in an Uncertain Word. *Journal of Public Economics* 131: 142-155.
- Wu, A. M. dan W. E. N. Wang. 2013. Determinants of Expenditure Decentralization: Evidence from China. *World Development* 46: 176-184.